



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang / 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran:
1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani SPM;
 8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 14. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Papua Tengah;
 15. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;

16. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; dan
 17. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Gubernur Papua Tengah.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. menandatangani SPM-GU, SPM-LS dan SPM-TU;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
 8. melaksanakan tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Pengeluaran:
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
 3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
 5. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 6. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 7. mendistribusikan biaya kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;

8. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
 9. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
 10. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
 11. menyetorkan sisa kas yang tidak digunakan lagi ke rekening kas daerah atas perintah; dan
 12. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
 2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik; dan
 5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. Bendahara Penerimaan:
1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 2. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
 3. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke RKUD pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

4. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
 5. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
 6. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu:
1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
 7. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
 8. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT: .../7

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Januari 2026
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	dr. Silwanus A Soemoele, SpOG (K)., M.H.Kes NIP 197106032000121004	Pengguna Anggaran
		Beatrick Rombe, S.E. NIP198912232011042002	Bendahara Pengeluaran
		Vivian Andenita Gobai, S.IP NIP 198606032007012001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum
		Surya Darman Ritho, S.T. NIP 198008072017121001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum
		Martinus Agapa, S.E., M.Ak. NIP 198102162006051002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Barang dan Jasa
		Hamsyah Lapallu NIP 198502012010041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Barang dan Jasa
		Yohanes You, S.Ag.,M.Hum. NIP 197501142000031002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Edwin Deda, S.E. NIP 197907052023111001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

		Lambertus Wakerkwa, S.Sos NIP 196802131996101001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		Armita Widiasmara Venny Ritonga NIP 198403152023112001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		Yulius Manurung, S.H., M.H. NIP 197606082002121002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum
		Sitti Nurlaela M Paturusi, S.Hut. NIP 198110292023102001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
		Melianus Kotouki, S.IP., M.Si NIP 198105102005021003	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi
		Ruth Desy Kayame, S.AK NIP 200009272025062013	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi
2.	SEKRETARIAT DPRD	Charles Pangidoan Situmorang, S.E., M.Si. NIP 197906042006051001	Pengguna Anggaran
		Ilma Parinto Tandiseru, S.Pd. NIP 198106102015121001	Bendahara Pengeluaran
3.	INSPEKTORAT	Apniel Pongtuluran, S.Kom., M.M. NIP 197904112005021005	Pengguna Anggaran
		Erna Purwati, SE NIP 198502042015012002	Bendahara Pengeluaran
4.	SEKRETARIAT MRP-PPT	Elimelek Edowai, S.Sos NIP 197503061997121001	Pengguna Anggaran
		Ronald Mual NIP 198009252015031002	Bendahara Pengeluaran
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nurhaidah, S.E. NIP 197805292003122005	Pengguna Anggaran
		Triko Datu Musa, S.Pd NIP 198701112017111001	Bendahara Pengeluaran
6.	DINAS KESEHATAN	dr. Agus M. Kes., CH. Med., CHT. NIP 198008292008011011	Pengguna Anggaran
		Susana Fitriyani Rauf, S.Km., M.M. NIP 198108012006052001	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,	Ir. Yulianus M. Mambrasar, S.T., M.Si, M.T. NIP 197607031996101001	Pengguna Anggaran

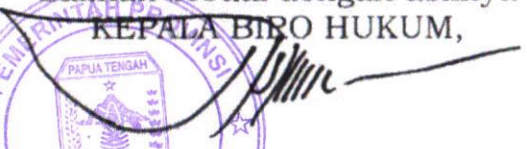
	PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permawati, S.E. NIP 198102092008012013	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS SOSIAL	Roni Misikmbo, S.Sos NIP 198206092006051001	Pengguna Anggaran
		Adi Setia Bakti, S.Tr.IP NIP 200003022022081002	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Frets James Boray, S.E., M.Si NIP 196702181989121002	Pengguna Anggaran
		Sisilia Limbong P, SE NIP 198404212011042002	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	Karlos Murib, S.IP., MAP. NIP 197210131992031004	Pengguna Anggaran
		Fathudin Tiro NIP 198109232023111001	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	dr. Kardus Matuan, S.St.Pl., MM. NIP 197210131992031004	Pengguna Anggaran
		Herry Kamisopa, S.Sos NIP 197601202001121005	Bendahara Pengeluaran
		Ian Aprianto Murmana, S.AK. NIP 199504022025061010	Bendahara Penerimaan
12.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	drh. Rafael Heri Nugroho NIP 198106302005021002	Pengguna Anggaran
		drh. Dwi Arum Permatasari, S.Kh. NIP 200108312025062014	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	Yan Richard Pugu, S.Hut, M.Si NIP 197310242000121002	Pengguna Anggaran
		Arlin Ratunna NIP 196905071992022002	Bendahara Pengeluaran
		Noventy Selamat, S.AK NIP 199811092025062009	Bendahara Penerimaan
14.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,	ALBERTUS IYAI, A.Md NIP 197603272000121001	Pengguna Anggaran

	PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Hardianti NIP 199110082015112001	Bendahara Pengeluaran
15.	DINAS PERHUBUNGAN	Ewanggen Kokoya, S.Th., M.AP NIP 197005022000031005	Pengguna Anggaran
		Everdina Evitha Demetouw NIP 198309062023112001	Bendahara Pengeluaran
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Ham A. Nawipa, S.SIT NIP 197604261991031008	Pengguna Anggaran
		Novita Gobay NIP 199211302015112001	Bendahara Pengeluaran
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Norbetus Mote, SE, M.Si NIP 197311232005021003	Pengguna Anggaran
		Susana Pekey, S.Sos NIP 197207241996101001	Bendahara Pengeluaran
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Marthen George Erari, S.KM., M.Ec. Dev. NIP 196803261993021001	Pengguna Anggaran
		Meryanti Patalle NIP 198203112015112001	Bendahara Pengeluaran
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Jem Telenggen, S.E., M.AP NIP 197911172003121003	Pengguna Anggaran
		Haris Mulyono Adi, S.E. NIP 198110292009041001	Bendahara Pengeluaran
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	Agustinus Bagau, S.KM., M.Kes (Epid) NIP 197508081995031003	Pengguna Anggaran
		Rheza Abdi Putra NIP 199308052015051001	Bendahara Pengeluaran
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Elieser Yogi, S.STP., M.Si NIP 198102182001121001	Pengguna Anggaran
		Muhammad Yusuf NIP 199204072011041001	Bendahara Pengeluaran
22.		Alexander Manangsang, S.Sos NIP 197411022000121004	Pengguna Anggaran

	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Dolyus Harniawan Bintara NIP 198901032017121002	Bendahara Pengeluaran
		Farida Watubun NIP198207052023112001	Bendahara Penerimaan
		Nicolas B.F. Mayor, A.Md NIP 197111032000121003	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Nabire
		Alfani Wahyu Sejati, SE NIP 198409132023112001	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Nabire
		John Sroyer NIP 197406142009021002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Nabire
		Mesak Yeimo, S. P. NIP 198405152010041003	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Paniai
		Murdiono, SE NIP 198005072009041009	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Paniai
		Maikel Tanati, S.E., MM. NIP 197407051996101001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Timika
		Alfian Armin NIP 198510262015041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Timika
		Paulus M. Kogoya NIP 199402232025061007	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Timika
		Pileki Kokoya, S.E., MM. NIP 198110122009091001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Mulia
		Yoseph Samuel Kreeuw, S.H. NIP 198609192011041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Mulia
		Slamet Darsono NIP 197503112010011001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Mulia
23.	BKPSDM	Denci Meri Nawipa, S.IP. NIP 197512272005022004	Pengguna Anggaran
		Novita Fince Adii, S.IP NIP 199211172020102001	Bendahara Pengeluaran
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Albertus Adii, ST, M.Si NIP 197811152006051004	Pengguna Anggaran

		Alfrida Somba, S.T. NIP 198204302015032002	Bendahara Pengeluaran
25.	BADAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POL PP	Jarius Agimbau, SE. NIP 197704151997121001	Pengguna Anggaran
		Stialani Micheria Waromi, SM NIP 198708302010042001	Bendahara Pengeluaran
26.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Otis Monei, S.Sos., M.Si NIP 197910022000121005	Pengguna Anggaran
		Dewi Mustika Junisari Murib NIP 200106172025062017	Bendahara Pengeluaran

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

